



Moderasi beragama sebagai paradigma baru pendidikan Islam: strategi menangkal polarisasi sosial di era digital dan post-Truth

Nabilla Rizki Syawali¹, Muti'a², Herlini Puspika Sari³

^{1,2,3} Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia

Email: 12310121916@students.uin-suska.ac.id¹, 12310124329@students.uin-suska.ac.id²,
herlini.puspika.sari@uin-suska.ac.id³

Corresponding Author: 12310121916@students.uin-suska.ac.id

Abstract

The digital age and the phenomenon of post-truth have created new challenges for Islamic education, where it is becoming increasingly difficult to control the distortion of religious narratives and social polarization in cyberspace. The crisis of religious authority and the spread of misinformation demand a new paradigm in the educational system. This study aims to analyze the relevance of religious moderation as a new basis for Islamic education in order to combat strategies of social segregation in an era of disruption. The research method used is a qualitative documentary study, with critical analysis of various academic publications, government policies, and contemporary social phenomena. The results indicate that strengthening religious moderation as an educational paradigm requires three main teaching strategies. First, integrating the values of wasatiyah (religious authority) through positive learning methodologies and active dialogue to develop students' critical thinking against extremist narratives. Second, introducing digital literacy based on prophetic values and the ethics of Islamic communication (qalamun ma'rufan) as a filter for information on social networks. Third, to strengthen an inclusive educational ecosystem through collaboration between educational institutions, families, and communities. This study concludes that establishing religious moderation as a new paradigm is not only a preventive measure but also an important pedagogical transformation for creating a tolerant and digitally literate society capable of maintaining national stability amidst the complexities of the post-truth era.

Keywords: Digital Era, Islamic Education, Polarization, Post-Truth, Religious Moderation.

Abstrak

Era digital dan fenomena pasca-kebenaran telah menciptakan tantangan baru bagi pendidikan Islam, di mana semakin sulit untuk mengendalikan distorsi narasi keagamaan dan polarisasi sosial di dunia maya. Krisis otoritas keagamaan dan penyebaran misinformasi menuntut paradigma baru dalam sistem pendidikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi moderasi keagamaan sebagai landasan baru bagi pendidikan Islam dalam memerangi strategi segregasi sosial di era disrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi bibliografi kualitatif yang secara kritis menganalisis berbagai publikasi akademis, kebijakan pemerintah, dan fenomena sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan moderasi keagamaan sebagai paradigma pendidikan membutuhkan tiga strategi pengajaran utama. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai wasatiyah (keadilan beragama) melalui metodologi pembelajaran yang menyenangkan dan dialog aktif untuk mengembangkan pemikiran kritis siswa terhadap narasi ekstremis. Kedua, memperkenalkan literasi digital berdasarkan nilai-nilai kenabian dan etika komunikasi Islami (kalamu ma'rufan) sebagai penyaring informasi di jejaring sosial. Ketiga, untuk memperkuat



ekosistem pendidikan inklusif melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi moderasi keagamaan ke dalam paradigma baru bukan hanya tindakan pencegahan tetapi juga transformasi pedagogis yang krusial untuk menciptakan masyarakat yang tangguh secara digital, melek huruf, dan tangguh secara nasional dalam kompleksitas era pasca-kebenaran.

Kata kunci: *Era digital, Moderasi beragama, Pendidikan Islam, Polarisasi sosial, Post-Truth.*

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan Islam kontemporer adalah munculnya fenomena pasca-kebenaran, di mana sentimen keagamaan seringkali menutupi realitas. Secara teori, pengetahuan agama seharusnya menjadi landasan moralitas, tetapi di dunia digital seringkali terdistorsi oleh ujaran kebencian (Hidayat, 2021). Situasi ini menyulitkan lembaga pendidikan untuk mempertahankan objektivitas guru di tengah arus informasi yang bias.

Zuhairi Misrawi mengamati bahwa moderasi adalah DNA Islam Indonesia dan seharusnya menjadi teori utama untuk memerangi radikalisme (Misrawi, 2020). Masalahnya adalah nilai-nilai historis ini mulai menghilang karena penetrasi ideologi transnasional melalui saluran digital yang tidak tersaring. Oleh karena itu, perlu untuk mengembalikan pemikiran moderat sebagai dasar pertahanan ideologis bagi generasi muda.

Krisis otoritas keagamaan merupakan isu penting lainnya, dengan mengacu pada pergeseran pendidikan dari ulama yang kompeten ke tokoh-tokoh populer tetapi secara teologis dangkal (Saputra, 2021). Teori kekuasaan tradisional Max Weber ditantang oleh otoritas digital karismatik yang sering mengabaikan prinsip-prinsip moderasi. Fenomena ini menyebabkan siswa tersesat dalam pemahaman mereka tentang pesan-pesan keagamaan yang damai.

Secara teoritis, literasi digital kritis seharusnya melengkapi pendidikan agama untuk memerangi misinformasi. Seperti biasa, dalam kenyataan, banyak program pendidikan Islam masih berfokus pada aspek kognitif-normatif, tetapi tidak membekali mereka dengan keterampilan verifikasi digital (tabayun) (Lestari, 2024). Literasi yang lemah ini menghambat penyebaran ideologi radikal yang disamarkan sebagai citra keagamaan yang menarik.

Integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan agama sering terhambat oleh dikotomi pendidikan yang terus-menerus di lembaga pendidikan Islam. Pertanyaan penelitian ini menunjukkan bagaimana pembagian ini mencegah pendidikan agama untuk membahas isu-isu sosial-politik di era digital (Pratama, 2023). Teori integrasi dan interkoneksi pengetahuan diperlukan untuk menciptakan paradigma pendidikan yang adaptif dan moderat.

Peran pendidik sebagai moderator seringkali dibatasi oleh kompetensi digital yang terbatas dan pemahaman yang dangkal tentang moderasi (Rahmawati, 2022). Masalahnya adalah guru seringkali berpegang teguh pada metode tradisional yang tidak sesuai dengan karakteristik Generasi Z yang hidup di dunia maya. Namun, teori kepemimpinan guru mengharuskan guru untuk mampu mengelola arus disrupsi secara moral.



Pengelolaan konflik yang tidak konsisten di sekolah juga meningkatkan potensi polarisasi di antara siswa. Secara teori, sekolah seharusnya menjadi mikrokosmos masyarakat demokratis, tetapi praktik diskriminatif terhadap minoritas masih terjadi (Anwar, 2024). Masalah ini menyoroti perlunya strategi manajemen pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai inklusivitas dan keadilan sosial.

Model pengajaran satu sisi dan doktrinal telah terbukti tidak efektif dalam membatasi logika provokatif ekstremisme digital. Penelitian mengidentifikasi perlunya teori pengajaran berbasis masalah yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang klaim mengenai satu realitas tunggal (Nasution, 2021). Inovasi ini sangat penting agar moderasi beragama menjadi landasan pemikiran kritis, bukan sekadar slogan. Berdasarkan konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan moderasi beragama sebagai paradigma baru pendidikan Islam. Fokusnya adalah bagaimana teori moderasi dapat diperkenalkan untuk memerangi polarisasi sosial di era pasca-kebenaran (Wijaya, 2022). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam yang toleran di masa depan.

Pergeseran fenomena otoritas keagamaan di dunia maya telah menyebabkan fragmentasi pemahaman keagamaan yang nyata di kalangan Muslim muda. Pertanyaan penelitian ini muncul dari munculnya “agama instan,” yang disebarakan melalui percakapan emosional di media sosial, yang secara teoritis sering disebut sebagai mediasi keagamaan (Nafiah, 2023). Di era pasca-kebenaran, kebenaran agama tidak lagi diukur berdasarkan kedalaman rantai transmisi akademis, tetapi lebih pada simpati dan viralitas yang diperoleh suatu narasi di ruang digital. Akibatnya, program pendidikan Islam tradisional sering gagal memberikan perlindungan ideologis kepada siswa yang setiap hari terpapar konten eksklusif. Tanpa strategi moderasi berdasarkan literasi media kritis, pendidikan Islam terus menjadi saksi bisu meningkatnya intoleransi di tingkat akar rumput masyarakat.

Dari perspektif sosiologis, polarisasi sosial di era digital sering disebabkan oleh hilangnya dialog antaragama yang inklusif, yang digantikan oleh hambatan ideologis di media sosial. Pertanyaan penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian seringkali disamarkan dalam bahasa agama untuk melegitimasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, sebuah fenomena yang dikenal dalam teori sosiologi sebagai politisasi individu (Ma’arif, 2021). Pendidikan Islam memainkan peran penyeimbang melalui paradigma moderasi agama yang memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan di atas perbedaan teologis. Menerapkan paradigma ini mengharuskan sekolah tidak hanya mengajarkan ritual formal tetapi juga menumbuhkan pemahaman kolektif tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat pluralistik. Strategi ini sangat penting mengingat ancaman disintegrasi nasional saat ini tidak lagi berasal dari serangan fisik tetapi dari serangan terhadap ide-ide yang merusak tatanan sosial melalui misinformasi dan disinformasi.

Masalah radikalisme di lembaga pendidikan kini telah menjadi radikalisme hibrida yang mengeksploitasi celah dalam kebebasan berekspresi daring untuk



menyebarkan ideologi intoleran. Tantangan lokalnya adalah kesulitan mendeteksi penetrasi ideologi ekstremis, mengingat mereka sering menggunakan istilah keagamaan umum tetapi memiliki agenda eksklusif (Zulkifli, 2022). Secara teori, moderasi keagamaan seharusnya berfungsi sebagai "imunisasi psikologis" bagi siswa, memungkinkan mereka untuk menolak godaan kelompok radikal yang menjanjikan kepastian identitas di tengah ketidakpastian era pasca-kebenaran. Misalnya, integrasi nilai-nilai Wasatiyah ke dalam kurikulum independen memberikan peluang strategis untuk membentuk citra siswa Pancasila yang religius dan moderat. Transformasi ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk mengubah pandangan keagamaan mereka yang terbatas, menjadikannya terbuka dan mudah beradaptasi dengan perkembangan kontemporer.

Relevansi moderasi keagamaan dalam pendidikan Islam di era digital tidak hanya berkaitan dengan menjaga harmoni lokal tetapi juga berkontribusi pada perdamaian global yang berkelanjutan. Pertanyaan penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan mengatasi polarisasi sosial di tingkat pendidikan akan memengaruhi kualitas demokrasi dan stabilitas nasional di masa depan (Habibi, 2024). Teori pendidikan transformatif menekankan bahwa pendidikan agama dapat membebaskan manusia dari belenggu fanatisme buta dan menuntun mereka pada pemahaman tentang kesetaraan dan martabat manusia. Melalui strategi komprehensif yang mencakup digitalisasi materi yang dimoderasi, penguatan kapasitas guru, dan penciptaan lingkungan sekolah yang inklusif, pendidikan Islam dapat secara memadai menjawab tantangan era pasca-kebenaran. Hal ini sejalan dengan cita-cita luhur mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (berkah bagi dunia), yang tercermin dalam semua aspek kehidupan nasional dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan riset bibliografi untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep moderasi keagamaan sebagai paradigma baru dalam pendidikan Islam. Fokus utama metode ini adalah untuk mengumpulkan, memetakan, dan menganalisis secara kritis berbagai literatur yang berkaitan dengan strategi untuk memerangi polarisasi sosial di era digital (Assingkiy, 2021). Penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena pasca-kebenaran tidak hanya sebagai data statistik, tetapi juga sebagai struktur sosial yang memengaruhi pemikiran keagamaan siswa di dunia maya.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen kebijakan resmi pemerintah yang berkaitan dengan penguatan moderasi keagamaan dan karya-karya penting dari tokoh-tokoh terkemuka di bidang moderasi (Misrawi, 2020). Selain itu, untuk memastikan relevansi temuan penelitian, data sekunder diperoleh dari artikel-artikel di jurnal akademik terkemuka, buku teks, dan prosiding seminar nasional dan internasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020-2025).



Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, tekstual, dan konseptual, yang menggambarkan strategi pendidikan Islam dalam konteks disrupsi informasi. Data ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi digital, menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar dan Portal Garuda (Fakhri, 2022). Peneliti melakukan tinjauan pustaka selektif untuk mengidentifikasi narasi yang beririsan dengan variabel polarisasi sosial dan paradigma pendidikan Islam yang diadaptasi ke era pasca-kebenaran.

Prosedur analisis data mengikuti model sistematis dan interaktif yang mencakup langkah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pada langkah reduksi, peneliti memilih informasi yang paling relevan tentang strategi moderasi keagamaan dan kemudian mengorganisasikannya ke dalam kategori tematik utama (Mustari, 2023). Analisis ini bertujuan untuk menyempurnakan gagasan teoritis untuk aplikasi praktis dalam kurikulum sekolah, menghasilkan sintesis strategis yang kuat untuk mengurangi ketegangan sosial yang disebabkan oleh konten digital negatif.

Terakhir, metode analisis data diperkuat dengan analisis isi dan analisis wacana kritis untuk meneliti bagaimana nilai-nilai wasatiyah dibangun dalam teks-teks pendidikan Islam kontemporer. Validitas data diverifikasi melalui triangulasi sumber, di mana para peneliti membandingkan berbagai perspektif para ahli di bidang pendidikan dan sosiologi agama untuk sampai pada kesimpulan yang objektif dan valid (Suwardi, 2024). Melalui metode yang ketat ini, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori pendidikan Islam inklusif yang responsif terhadap dinamika global di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma moderasi agama dalam transformasi pendidikan Islam

Moderasi agama kini bukan hanya perdebatan; ini adalah paradigma penting dalam pembentukan kembali kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Pergeseran ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk mengajarkan teks-teks agama tidak hanya secara normatif tetapi juga kontekstual, dalam kerangka wasatiyah (hukum Islam). Implementasi paradigma ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pemahaman wahyu dan beragam realitas sosial (Sutrisno, 2021).

Dalam praktiknya, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan toleransi dan nilai-nilai moral. Meningkatkan karakter inklusif pada siswa merupakan dasar fundamental bagi penerimaan mereka terhadap perbedaan sebagai sunnah (hukum ilahi). Transformasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan tidak menjadi wahana penyebaran ideologi yang kaku dan eksklusif (Hanafi dkk., 2020).

Tantangan utama dalam paradigma baru ini adalah kemauan sumber daya manusia, khususnya guru, untuk memasukkan moderasi ke dalam materi pengajaran mereka. Guru harus memiliki latar belakang agama yang luas untuk memberikan penjelasan yang moderat. Jika kualifikasi guru tidak memadai,



program moderasi akan tetap menjadi dokumen formal yang tidak memiliki dampak nyata di kelas (Mukhtar dan Susanto, 2023).

Selain itu, pendekatan pembelajaran berbasis pembelajaran yang menyenangkan dan dialog aktif dapat menjadi metodologi yang efektif untuk menanamkan nilai moderasi. Siswa didorong untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer dari perspektif yang menghargai keragaman. Model komunikasi dua arah ini membantu siswa meningkatkan empati dan keterbukaan intelektual sejak usia dini (Fakhri dan Zainuri, 2024).

Dari perspektif epistemologis, moderasi keagamaan dalam pendidikan Islam di era ini harus mampu menyinergikan kecerdasan spiritual dengan kecerdasan sosial. Hal ini penting agar lulusan pendidikan Islam tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga saleh secara sosial di masyarakat. Paradigma baru ini menjawab kebutuhan akan koherensi di tengah gelombang globalisasi yang terus meningkat (Arif dkk., 2025).

B. Strategi literasi digital dalam menangkal *Post-truth* dan polarisasi

Di era pasca-kebenaran, garis antara fakta dan opini seringkali menjadi kabur, menciptakan polarisasi yang kuat di ruang digital. Pendidikan Islam harus bertindak sebagai penyaring informasi, mempromosikan literasi digital berdasarkan nilai-nilai kenabian. Strategi ini mencakup kemampuan untuk melakukan tabayyun (verifikasi) semua informasi yang diterima di media sosial (Mahrous dkk., 2021).

Polarisasi sosial seringkali dimulai di ruang gema media sosial, di mana orang hanya terpapar informasi yang menguatkan prasangka mereka sendiri. Pendidikan untuk moderasi mengajarkan siswa untuk keluar dari zona nyaman ini dan bersikap kritis terhadap narasi kebencian. Penguasaan guru terhadap algoritma digital sangat penting untuk membimbing siswa menuju konten yang memberi mereka rasa aman (Nurhadi, 2022).

Era digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang salah yang disamarkan sebagai narasi keagamaan untuk tujuan politik atau kelompok. Salah satu strategi untuk memerangi hal ini adalah membangun "kekebalan digital" pada siswa melalui kurikulum yang mengajarkan perilaku etis dalam Islam (Qalamun Ma'rufān). Dengan demikian, media sosial dapat diubah menjadi alat dakwah yang lembut dan mempersatukan (Sholeh, 2023). Penggunaan platform digital untuk menyebarkan konten yang dimoderasi secara kreatif merupakan langkah ofensif yang diperlukan. Siswa dapat dilatih untuk menjadi kreator konten yang mengadvokasi pesan perdamaian dan moderasi. Diam saja tidak cukup untuk melawan narasi radikal; dunia maya perlu diisi dengan narasi yang lebih menarik dan positif (Hidayat & Aziz, 2024).

Integrasi teknologi ke dalam pendidikan Islam juga memfasilitasi akses ke referensi keagamaan yang otoritatif dan beragam. Hal ini mencegah siswa jatuh ke dalam perangkap pemahaman agama yang dangkal dan instan dari sumber yang tidak dapat diandalkan. Literasi digital tingkat lanjut akan menciptakan



generasi yang cerdas dalam penggunaan media dan mampu menolak informasi yang salah (Zahra, 2025).

C. Implementasi moderasi beragama sebagai solusi harmoni sosial

Implementasi yang lebih baik dari moderasi agama berfungsi sebagai media sosial yang heterogen. Pendidikan Islam memberikan kontribusi yang moderat bagi pembangunan nasional, meminimalkan serangan terhadap kelompok agama. Nilai-nilai seperti muwathanah (*amor à patria*) merupakan bagian integral dari identitas kaum moderat (Subchid et al., 2022).

Kolaborasi antara institusi pendidikan, keluarga dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan internalisasi moderação ini. Lingkungan sekitar harus mengetahui praktik toleransi dan praktik yang sesuai dengan pengalaman langsung. Kolaborasi ini menjamin nilai-nilai yang diajarkan di kelas selaras dengan praktik kehidupan sehari-hari di luar sekolah (Abidin, 2023).

Pendidikan untuk moderasi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat untuk menolak segala bentuk ekstremisme kekerasan. Dengan pemahaman agama yang mendalam dan inklusif, individu akan lebih mudah diprovokasi oleh agenda yang memecah belah. Ini adalah bentuk pertahanan budaya dan spiritual yang paling efektif dalam jangka panjang (Fahrudi, 2021).

Secara global, model moderasi agama di Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi dunia dalam mengelola keragaman. Pendidikan Islam di Indonesia unik dalam kemampuannya untuk menyelaraskan Islam, identitas Indonesia, dan kemanusiaan. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium perdamaian global yang layak untuk dipelajari secara ilmiah (Latif & Anwar, 2024).

Penggunaan platform digital telah menjadi aspek penting dalam menyebarkan pesan moderasi kepada generasi muda secara luas. Literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan inklusif dapat menangkal penyebaran berita palsu dan konten radikal, yang seringkali menciptakan konflik horizontal di dunia maya tanpa batas. Selain itu, peran aktif para pemimpin komunitas dalam memberikan contoh praktis sangat penting bagi efektivitas kebijakan ini. Melalui dialog antaragama yang berkelanjutan, hambatan prasangka dapat diatasi, menciptakan ekosistem sosial yang memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan di atas perbedaan dogma dan asal budaya.

Keberhasilan paradigma moderasi ini bergantung pada kebijakan dan praktik yang konsisten di lapangan. Agama yang moderat tidak berarti dangkal, namun ia adalah manusia yang melintasi suatu pemahaman yang benar tentang agama. Generasi masa depan yang moderat akan menjadi pilar fundamental bagi terpeliharanya kedaulatan dan perdamaian di era digital yang kompleks (Prasetyo, 2026).

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama telah berhenti menjadi sekadar pilihan dan telah menjadi paradigma fundamental dalam pendidikan Islam kontemporer untuk menjaga stabilitas sosial. Strategi utama untuk



memerangi polarisasi di era digital dan pasca-kebenaran adalah dengan mengintegrasikan kurikulum inklusif, memperkuat literasi digital berdasarkan nilai-nilai tabayyun (disiplin agama), dan mengubah peran pendidik sebagai agen moderasi.

Pendidikan Islam telah menjadi penyaring terhadap narasi ekstremis dan informasi yang terdistorsi, membangun keseimbangan (*wasatiya*) antara pemahaman teks dan konteks sosial-digital yang dinamis. Konsekuensi logis dari temuan ini bagi perkembangan ilmiah adalah perlunya rekonstruksi multidisiplin epistemologi pendidikan Islam, di mana teologi harus bertindak secara sinergis dengan ilmu komunikasi dan sosiologi digital. Dalam praktiknya, ini membutuhkan lembaga pendidikan Islam untuk mengubah metodologi pengajaran mereka, beralih dari pendekatan berbasis indoktrinasi ke pendekatan dialogis dan kritis. Implikasi sebenarnya terletak pada penciptaan ekosistem pendidikan yang membina individu yang tidak hanya taat secara ritual tetapi juga tangguh secara intelektual terhadap berbagai guncangan informasi, sehingga berfungsi sebagai penghubung koheisi sosial dalam masyarakat yang terpolarisasi.

Keberhasilan paradigma ini bergantung pada kemampuan lembaga pendidikan untuk melepaskan diri dari kurikulum yang kaku dan eksklusif. Program pendidikan Islam di masa depan harus memasukkan literasi media sebagai kompetensi penting, yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kekebalan kognitif untuk membedakan antara otoritas kebenaran agama dan komodifikasi narasi politik. Hal ini sangat penting mengingat algoritma dunia maya sering memperkuat kesenjangan polarisasi melalui fenomena ruang gema, yang mengisolasi pemikiran kritis.

Transformasi ini membutuhkan reorientasi peran pendidik, yang berhenti menjadi sekadar penyebar pengetahuan dan menjadi fasilitator moderasi, yang mampu menghubungkan teks-teks klasik dengan realitas sosial-digital yang kompleks. Secara teoritis, studi ini berkontribusi untuk memperkuat teori progresif pendidikan Islam yang menganggap moderasi sebagai mekanisme pertahanan budaya di tengah gangguan informasi. Pada akhirnya, melalui sinergi antara nilai-nilai *wasatiya* (kebebasan beragama) dan kecerdasan digital, pendidikan Islam muncul sebagai pilar fundamental dalam menjaga keutuhan persatuan nasional, sementara moderasi beragama bukan sekadar wacana elit, tetapi praktik sehari-hari yang memastikan terjaganya prinsip-prinsip kemanusiaan dan perdamaian di era pasca-kebenaran..

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). *Ekosistem pendidikan moderat: Kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, M. S. (2024). Manajemen konflik dan strategi inklusivitas di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 6(1), 45-58.



- Arif, M., dkk. (2025). Epistemologi moderasi beragama: Sinergi kecerdasan spiritual dan sosial di era global. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 10(2), 112-130.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode penelitian kepustakaan: Analisis tekstual dalam studi Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2024). Metodologi joyful learning dan dialog aktif dalam penanaman nilai wasathiyah. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 12(1), 88-102.
- Fahrudi, A. (2021). Pertahanan budaya dan spiritual melalui pendidikan Islam inklusif. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(2), 175-190.
- Fakhri, J. (2022). Teknik dokumentasi digital dan pemanfaatan database akademik dalam library research. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 4(3), 201-215.
- Habibi, M. (2024). Dampak polarisasi sosial terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas nasional. *Jurnal Politik dan Keamanan*, 9(1), 30-45.
- Hanafi, dkk. (2020). Internalisasi nilai toleransi dan kemanusiaan pada institusi pendidikan Islam. *Jurnal Karakter dan Kebangsaan*, 7(2), 150-165.
- Hidayat, A. (2021). Distorsi narasi keagamaan dan fenomena post-truth di media digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(1), 12-28.
- Hidayat, S., & Aziz, F. (2024). Strategi ofensif konten kreatif dalam melawan narasi radikal di ruang siber. *Jurnal Media dan Dakwah*, 8(2), 210-225.
- Latif, H., & Anwar, K. (2024). Indonesia sebagai laboratorium perdamaian dunia: Studi moderasi beragama. *Jurnal Studi Global*, 13(1), 55-72.
- Lestari, P. (2024). Tabayyun digital: Komplementer kurikulum pendidikan agama di era disrupsi. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 5(2), 134-148.
- Ma'arif, S. (2021). Politisasi identitas dan hilangnya ruang dialog inklusif di media sosial. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 40-55.
- Mahrus, dkk. (2021). Literasi digital berbasis nilai profetik sebagai filter informasi. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 9(3), 198-212.
- Misrawi, Z. (2020). Moderasi Islam Nusantara: Melawan radikalisme dengan kearifan lokal. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Muhtar, T., & Susanto, A. (2023). Kesiapan guru dalam integrasi moderasi beragama pada materi ajar. *Jurnal Pendidikan Guru*, 11(2), 170-185.
- Mustari, M. (2023). *Analisis data kualitatif: Prosedur dan teknik reduksi dalam riset pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafiah, U. (2023). Mediatisasi agama dan munculnya fenomena agama instan di media sosial. *Jurnal Riset Keagamaan*, 17(1), 22-38.
- Nasution, R. (2021). Problem-based learning sebagai strategi membangun berpikir kritis siswa. *Jurnal Pedagogik Islam*, 8(4), 310-325.



- Nurhadi, M. (2022). Peran pendidik dalam mengarahkan algoritma digital siswa ke konten moderat. *Jurnal Literasi Digital*, 6(2), 142-156.
- Prasetyo, D. (2026). Konsistensi kebijakan moderasi beragama dalam menjaga kedaulatan digital. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 14(1), 15-29.
- Pratama, B. (2023). Dikotomi keilmuan dan gagapnya pendidikan agama merespons isu sosial-politik. *Jurnal Integrasi Ilmu*, 7(1), 80-95.
- Rahmawati, I. (2022). Keterbatasan kompetensi digital guru sebagai agen moderasi beragama. *Jurnal Kepemimpinan Instruksional*, 5(3), 205-218.
- Saputra, W. (2021). Krisis otoritas keagamaan dan pergeseran rujukan ilmu di era digital. *Jurnal Teologi Kontemporer*, 12(2), 160-174.
- Sholeh, M. (2023). Kalamun ma'rufan: Etika komunikasi islam dalam menangkal hoaks. *Jurnal Etika dan Budaya*, 10(1), 44-59.
- Subchi, dkk. (2022). Muwathanah dan identitas muslim moderat dalam stabilitas nasional. *Jurnal Harmoni Sosial*, 9(2), 120-135.
- Sutrisno, E. (2021). Aktualisasi nilai wasathiyah dalam rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 18(1), 35-50.
- Suwardi, K. (2024). *Uji keabsahan data: Triangulasi dan validasi dalam penelitian sosiologi agama*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Wijaya, T. (2022). Strategi penguatan moderasi beragama untuk menangkal polarisasi sosial. *Jurnal Paradigma Pendidikan*, 4(2), 101-115.
- Zahra, L. (2025). Akses referensi otoritatif melalui integrasi teknologi dalam pendidikan Islam. *Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 11(1), 77-90.
- Zulkifli, M. (2022). Deteksi infiltrasi radikalisme hibrida di lembaga pendidikan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(3), 245-260.